



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 104 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BOGOR TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2021 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan Perkada tentang RKPD ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 59);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah KotaBogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E); .
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 1 Seri D);

26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
28. Peraturan Walikota Bogor Nomor 84.Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 78 Seri E);
29. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 50 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR TAHUN 2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta Pagu Anggaran Sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kota Bogor.

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Bogor.

BAB II KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kedudukan Renja Perangkat Daerah merupakan:
 - a. dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 - b. penjabaran dari RKPD Kota Bogor tahun 2021 yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat daerah dengan indikator kinerja yang terukur pada setiap rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah
- (3) Tujuan penetapan Renja Perangkat Daerah adalah untuk:
 - a. mewujudkan pencapaian target kinerja perangkat daerah yang mendukung visi dan misi daerah;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar sektor, antar ruang, antar waktu dan antar pemangku kepentingan;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD TAHUN 2021

Pasal 3

- BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB IV PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah dapat diubah dalam hal terjadi perubahan RKPD Kota Bogor yang dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Mekanisme pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan terhadap rencana kerja perangkat daerah;
- b. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana dari masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya;
- d. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah;
- e. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD dan renja perangkat daerah tahun berikutnya.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 7

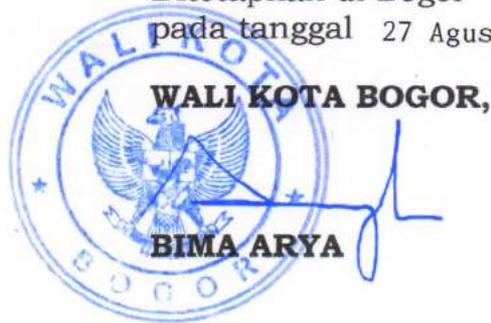
Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 27 Agustus 2020



Diundangkan di Bogor
pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 90 SERI E

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara global, penambahan populasi manusia adalah ancaman terbesar dari masalah lingkungan hidup, karena setiap orang memerlukan energi, lahan dan sumberdaya yang besar untuk bisa bertahan hidup. Keseimbangan antara lingkungan dan populasi dapat tercapai jika penambahan populasi dapat ditekan pada kondisi ideal. Tetapi kenyataannya, populasi tumbuh lebih cepat dari kemampuan lingkungan kita untuk memperbaiki sumberdaya yang ada. Oleh karena itu, jika tidak ada tindakan untuk mengendalikan lingkungan hidup maka diprediksi daya dukung lingkungan hidup semakin lama tidak akan mampu menopang penambahan populasi manusia.

Eksplorasi sumberdaya alam secara berlebihan dan berkurangnya pemanfaatan sumber daya manusia telah menciptakan masyarakat yang tidak adil secara sosial, sehingga melahirkan kesenjangan antar golongan dalam suatu bangsa. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup diyakini timbul sebagai akibat dari berbagai aktivitas manusia yang meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk. Meningkatnya aktivitas manusia dalam berbagai bidang, terutama perindustrian, telah menimbulkan berbagai masalah sosial dan lingkungan hidup. Akibat dari pencemaran dan kerusakan di suatu tempat, dampaknya dirasakan pula oleh tempat yang jauh. Masalah lingkungan berkembang lebih lanjut tidak saja aspek ekologi tetapi juga aspek sosial, ekonomi dan politik. Isu dasar yang dihadapi semua bangsa adalah menjaga keseimbangan antara kegiatan pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam dengan daya dukung lingkungan hidup yang terbatas.

Pembangunan industri telah mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Perhatian masyarakat dunia terhadap lingkungan hidup dimulai sejak tahun 1972 di stockholm. Hal ini dipertegas pada KTT bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992, dimana isu lingkungan menjadi masalah politik dan ekonomi, khususnya berkaitan dengan perdagangan internasional dan masalah pemberian bantuan dari negara maju kepada negara-negara berkembang.

Isu lingkungan global pada saat ini meliputi : 1) perubahan iklim global, 2) kehilangan keanekaragaman hayati, 3) penipisan lapisan ozon, 4) degradasi/perusakan air tawar, 5) desertifikasi dan degradasi lahan, 6) deforestasi dan pemanfaatan hutan secara tidak berkelanjutan, 7) lingkungan kelautan, dan 8) polutan organik persisten.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut, SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan sektor lingkungan hidup. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perda Kota Bogor no 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota No 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Bogor, Dinas Lingkungan Hidup merupakan pelaksanaan urusan lingkungan hidup untuk sub bidang RPPLH kota Bogor, KLHS untuk Kebijakan Rencana Program (KRP) Kota Bogor, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kota Bogor, Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kota Bogor, Penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kota Bogor, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk kelembagaan kemasyarakatan Daerah kota Bogor, Pemberian penghargaan lingkungan hidup daerah kota Bogor, penyelesaian pengaduan, dan pengelolaan sampah.

Sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN, maka RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bogor. RPJMD tersebut bagi SKPD akan dijadikan pedoman penyusunan Renstra SKPD. Setiap tahunnya, RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Bogor, dan RKPD ini akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Berkaitan dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penjabaran RPJMD kedalam RKPD Kota Bogor akan dijadikan pedoman bagi

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor. Sedangkan bagi SKPD, berdasarkan Renja SKPD disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD, maka disusun rincian APBD dalam bentuk DPA SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor yang dibebani tugas melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan daerah Kota Bogor di bidang Lingkungan Hidup, yang eksistensi dan kewenangannya dinyatakan secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, yang tertuang di dalam beberapa produk perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 48510
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan lembaran Negara Nomor : 5059);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan lembaran Negara Nomor : 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Walikota Nomor 56 TAHUN 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Bogor.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahunan ini adalah untuk memberi gambaran informasi Program, kegiatan-kegiatan serta rencana Anggaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor pada tahun 2021, baik Belanja Tidak Langsung maupun pelaksanaan Belanja Langsung.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana kerja ini adalah untuk :

- a. Sebagai bahan dasar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
- b. Sebagai pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam melaksanakan kegiatannya pada tahun 2021 dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan pada Rencana Strategis.
- c. Sebagai bahan acuan untuk mengevaluasi kinerja kegiatan dan kinerja sasaran di tahun 2021 pada akhir tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, Proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD serta ditindaklanjuti dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renja SKPD serta susunan garis besar dokumen.

Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada penyusunan Renja sudah disahkan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada laporan kinerja tahunan SKPD dan / atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Tabel yang perlu disajikan dalam bagian ini adalah tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD (tabel 1).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- c. Dampaknya terhadap pencapaian RPJMD dan terhadap capaian program nasional seperti SPM.

- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

- 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
- 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
- 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
- 4. Lampiran tabel berikut, Tabel T-C.31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai :

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh.
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2014 dan prakiraan maju (tahun $n+1$), sebagaimana tabel 2.

Bab IV. Penutup.

Berisikan uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan, maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 serta Target Capaian Program sesuai dengan Renstra DLH serta RPJMD Kota Bogor Tahun 2020-2024 mencakup 11 (sebelas) Program dengan sasaran dan indikator kinerja Sebagai berikut :

Tabel 2.1. Target Capaian pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019

| No | Program | Indikator Program | Target 2019 | Realisasi 2019 |
|----|--|--|-------------|----------------|
| 1 | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah | Presentase Volume Sampah Terangkut (%) | 75,37 | 77,04 |
| 2 | Perbaikan Optimalisasi Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA | Jumlah Sampah yang diolah di TPA | 98,95 | 98,95 |
| 3 | Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R | Reduksi Sampah (%) | 4,7 | 6,89 |
| | | Jumlah TPS 3R di daerah yang belum terlayani oleh angkutan (lokasi) | 18 | 26 |
| | | Jumlah Banks Sampah (lokasi) | 15 | 334 |
| 4 | Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | Tingkat Indeks Kualitas Air (%) | 55 | 51,67 |
| | | Tingkat Indeks Kualitas Udara (%) | 80 | 81,76 |
| | | Presentase ketersediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%) | 100 | 97,1 |
| | | Presentase pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang ditindak lanjuti (%) | 100 | 100 |
| | | Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi dan memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan | 120 | 120 |

| | | | | |
|----|--|--|-----|-----|
| | | | | |
| 5 | Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Presentase peningkatan rata-rata debit air dari sumber mata air (%) | 10 | 10 |
| | | Jumlah bangunan konservasi air tanah (unit) | 100 | 35 |
| | | Jumlah kawasan perlindungan, pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati (lokasi) | 7 | 7 |
| 6 | Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Informasi Kualitas Lingkungan yang dihasilkan pertahun (dokumen) | 2 | 4 |
| 7 | Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah inventarisasi dan identifikasi GRK (dokumen) | 1 | 1 |
| | | Jumlah Kampung iklim | 1 | 2 |
| 8 | Kemitraan Lingkungan Hidup | Jumlah sekolah yang difasilitasi dan dibina teknis Program Adiwiyata dan sekolah berbudaya lingkungan | 100 | 100 |
| | | Jumlah Sosialisasi Lingkungan Hidup (tema) | 3 | 3 |
| | | Jumlah Kampanye Lingkungan Hidup | 1 | 2 |
| 9 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD (Honor pegawai non PNS, ATK, Barang cetakan, Alat listrik & elektronik, Peralatan Kebersihan, Biaya Telepon, Surat Kabar, Mamin, Perjadin, BBM, PDH) (Bulan) | 12 | 12 |
| 10 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) | 100 | 100 |
| | | Inventaris Kantor yang terpelihara (%) | 100 | 100 |
| 11 | Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja OPD) dan laporan akuntabilitas (LKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | 100 | 100 |

Dari tabel diatas dapat terlihat realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi/telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Faktor-faktor penyebab tercapainya kinerja program/kegiatan :

1. Kenaikan capaian reduksi sampah di TPS 3R karena pemilahan sampah di rumah tangga mulai ditingkatkan dengan cara sosialisasi ke warga yang dilayani oleh TPS 3R secara door to door dan mengoptimalkan pemilahan sampah di TPS 3R.
2. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai kinerja, melakukan monitoring dan evaluasi kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) TPS 3R yang dilakukan secara tidak tetap maupun rutin terjadwal dalam pengelolaan sampah di TPS 3R, melakukan sosialisasi bottom up (berdasarkan permintaan warga) dan tidak massal sehingga lebih tepat sasaran dan efektif, mulai menetapkan target pemilahan sampah baik di rumah tangga yang dilayani oleh TPS 3R maupun mengoptimalkan pemilahan sampah di TPS 3R dengan target yang berbeda sesuai dengan kemampuan SDM, jumlah layanan dan komitmen KSM TPS 3R di masing-masing TPS 3R serta melakukan penimbangan setiap sampah yang masuk ke TPS 3R.
3. Penyebab keberhasilan indeks kualitas udara mencapai target tahun ini disebabkan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam mendukung program Langit Bersih.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan :

1. Tidak tercapainya indikator Indeks Kualitas Air adalah masih kurangnya optimalnya pengendalian pencemaran air sungai yang diakibatkan oleh limbah domestik baik yang berupa limbah cair maupun limbah padat (sampah).
2. Kondisi hulu baik Sungai Ciliwung maupun Cisadane yang ada di wilayah Kabupaten Bogor dan Cianjur yang mulai rusak akibat alih fungsi lahan menjadi daerah pemukiman dan pertanian menyumbang dampak buruk bagi pencemaran sungai, antara lain meningkatkan kadar TSS akibat masuknya limbah organik dan padatan dari sisa kegiatan pertanian dan alih fungsi lahan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas adalah :

Dengan teranggarkannya Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang meliputi :

- a. Kegiatan Pengujian dan Analisa Pengujian Kualitas Air (Air Sungai, Situ dan Sumur dan Air Limbah);
- b. Monitoring dan Evaluasi Percepatan Sanitasi Perkotaan (PPSP);
- c. Pembinaan Kegiatan Usaha Limbah B3;
- d. Inventarisasi dan Identifikasi Kegiatan Usaha Penghasil Limbah B3;
- e. Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan Terhadap AMDAL, UKL-UPL dan SPPL;
- f. Pengawasan dan Penegakan Hukum Wilayah I, II dan III;
- g. Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar.

Tabel 2.2. (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)*
Provinsi/Kabupaten/Kota Bogor

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|------|---|---|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2020 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 04 | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 04 | 2.01 | | | | | | | |
| 1 | 03 | 04 | 2.01 | 03 | | | | | | |
| 1 | 03 | 04 | 2.01 | 04 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|-------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 1 | 03 | 04 | 2.01 | 05 | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga Pengadaan Alat Berat Pengelolaan Sampah di TPA Penyusunan Laporan Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga Tersedianya BBM Solar HSD, BBM Bensin, dan Pelumas untuk 6 unit Alat Berat, 1 unit TruckTangki Air, 2 unit Mobil / Roda 4, dan 2 unit MotorSampah / Roda 3 Tersedianya Suku Cadang dan Pemeliharaan 9 unit Alat Berat, 1 unit Truck Tangki Air, 2 unit Mobil / Roda 4, 2 unit Motor Sampah / Roda 3, dan 6 unit Sepeda Motor / Roda 2 | 98.16 | 98.16 | 98.95 | 98.95 | 100.00 | 98.16 |
| 1 | 03 | 04 | 2.01 | 06 | Penyediaan Sarana Persampahan | Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana | 100 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|------|------|----|-------|--------|-------|
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | |
| 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | |
| 2 | 11 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | |
| 2 | 11 | 02 | 2.01 | | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah layanan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang terintegrasi sistem informasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 1 |
| 2 | 11 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | |
| 2 | 11 | 03 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Indeks Kualitas Air | 49.7 | 54 | 55 | 51.67 | 93.95 | 49.67 |
| | | | | | | Indeks Kualitas Udara | 86 | 79.5 | 80 | 81.76 | 102.20 | 85.9 |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Pengendalian pencemaran air pengendalian pencemaran udara | | | | | | |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Pembinaan dan bantuan teknis kampung iklim Tersusunnya dokumen inventarisasi GRK | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 1 |
| 2 | 11 | 03 | 2.03 | | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| 2 | 11 | 03 | 2.03 | 04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Pengelolaan sumber daya air | 5 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------|--------------------|
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | | Pengelolaan Kea neka ra gaman Ha yati Kabupate n/Kota | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100.00 | 0.5 |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kea neka ra gaman Ha yati | Terse dianya bibit ta naman, pupuk, terpeliharanya pena na man pohon ta hun se belumnya serta dokumentasi ke ha ti | | | | | | |
| 2 | 11 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | | | | |
| 2 | 11 | 05 | 2.01 | | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | | | | | | | |
| 2 | 11 | 05 | 2.01 | 02 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Kajia n Identifikasi dan Penangan an Timbulan Sa mpa h Limbah B3 yang ber SPPL dari ta hun 2019-2020Terlaksanya Sosialisasi Perizina n TPS limbah B3 bagi Kegiat an/Usaha Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki izin TPS B3 | 40 Kegiat an Usaha | 120 Kegiat an Usa ha | 120 Kegiat an Usaha | 120 Kegiat an Usaha | 100.00 | 40 Kegiat an Usaha |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 2 | 11 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | | | | |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiat an yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerinta h Daerah Kabupate n/Kota | | | | | | | |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiat an yang Wajib AMDAL,UKL-UPL, dan SPPL | 250 | 120 | 120 | 120 | 100.00 | 250 |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | 03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiat an yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerinta h Daerah Kabupate n/Kota | Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan wilayah 1 Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan wilayah 2 Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan wilayah 3 | 164 | 80 | 100 | 100 | 100.00 | 140 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 2 | 11 | 08 | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | | | |
| 2 | 11 | 08 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| 2 | 11 | 08 | 2.01 | 01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakatan | Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.00 | 3 |
| 2 | 11 | 09 | | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | | | |
| 2 | 11 | 09 | 2.01 | | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| 2 | 11 | 09 | 2.01 | 01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Pembinaan dan penilaian sekolah adiwiyata Per lomba kebersihan | 210 | 90 | 100 | 100 | 100.00 | 200 |
| 2 | 11 | 11 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | | | | |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | | Pengelolaan Sampah | | | | | | | |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 02 | Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pem anfaatan Kembali | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah dengan 3R Peningkatan PAD Retribusi Sampah | 6.6 | 4.4 | 4.7 | 6.89 | 146.60 | 6.4 |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 03 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pem ilahan, Pengum pulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Pelayanan Persampahan | 76.5 | 74.37 | 75.37 | 77.04 | 102.22 | 76 |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 04 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Honorarium PKWT 1272 orang | 1372 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 100.00 | 1,272 |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 06 | Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan | Pembayaran Retribusi dan Teeping Fee TPS Nambo | | | | | | |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.3. (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | SPM/ Standar nasional | Target IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|--|--------------------------|------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | | 2019 (thn n-2) | 2020 (thn n-1) | 2021 (thn n) | 2022 (thn n+1) | 2019 (thn n-2) | 2020 (thn n-1) | 2021 (thn n) | 2022 (thn n+1) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah | | 75,37 | 75,37 | 76 | 76,5 | 77 | 75,85 | 151,85 | 100% | 100% | |
| 2 | Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA | | 98,16 | 98,16 | 98,16 | 98,16 | 98,16 | 98,16 | 98,16 | 100% | 100% | |
| 3 | Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R | | 4,7 | 4,7 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 6,26 | 3,2 | 133% | 50% | |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 25 | 2600% | 2500% | |
| | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 253 | 72 | 1687% | 480% | |
| 4 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | | 55 | 55 | 49,6 | 49,7 | 49,8 | 49,67 | 27,33 | 90% | 55% | |
| | | | 80 | 80 | 85,9 | 86 | 86,1 | 81,76 | 78,56 | 102% | 91% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|--|
| | | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 274 | 167% | 228% | |
| | | | 100 | 100 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100% | 143% | |
| | | | 100 | 100 | 40 | 60 | 80 | 80 | - | | | |
| 5 | Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Air | | 100 | 100 | 35 | 35 | 35 | 122 | 295 | 122% | 843% | |
| | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | | | |
| | | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 7 | 7 | 1400% | 1400% | |
| 6 | Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 250% | 200% | |
| 7 | Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 300% | 200% | |
| 8 | Kemitraan Lingkungan Hidup | | 100 | 100 | 200 | 210 | 220 | 180 | 100 | 180% | 50% | |
| | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | |
| 9 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 | 12 | 12% | 12% | |
| 10 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | |
| | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | |
| 11 | Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 ditetapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Perubahan formal yang terjadi adalah rincian detil bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah.

Dengan terbitnya UU tersebut tidak banyak terjadi perubahan terhadap pembagian urusan antara Pemerintah yang berimplikasi terhadap perubahan sub-sub urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab/Kota. Oleh karenanya, dari sisi kewenangan tidak terjadi perubahan yang sangat drastis terkait kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan bidang lingkungan hidup dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pembahasan permasalahan pelayanan Dinas LH akan dipaparkan berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sesuai dengan perwali nomor 96 tahun 2018.

Pembahasan permasalahan pelayanan Dinas LH secara spesifik akan diklasifikasikan menjadi urusan pemerintahan Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran lingkungan, konservasi dan perubahan iklim, Bidang Persampahan dan Bidangn Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, serta UPTD Tempat Pemrosesan Akhir.

Isu adalah permasalahan yang dijumpai dan menjadi suatu opini publik yang harus segera dicari penyelesaiannya. Isu ini dapat berskala makro atau skala mikro. Isu-isu yang berkembang di masyarakat harus didukung oleh data-data yang valid, sehingga bukan isu yang tanpa dasar.

Strategis merupakan hal sangat penting, mendasar dan prioritas yang menghasilkan efek tertentu dan sangat menentukan kondisi selanjutnya.

Isu strategis di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah adanya ancaman terhadap krisis lingkungan pada masa depan yang diakibatkan oleh tingginya tingkat pencemaran dan degradasi lingkungan. Antisipasi terhadap kondisi ini pada masa depan adalah dengan melakukan berbagai tindakan yang tepat serta menjalankan aturan dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan dan pengendalian lingkungan.

Isu lainnya adalah mengatasi semakin meningkatnya pencemaran

lingkungan dan pemanasan suhu udara akibat polusi yang ditimbulkan oleh semakin meningkatnya kendaraan bermotor dan proporsi ruang terbangun. Oleh karena itu diperlukan integrasi dengan tantangan transportasi dan tata ruang yang ramah lingkungan.

Adapun permasalahan mendesak yang harus segera ditangani terkait dengan kondisi lingkungan di Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Sampah yang belum terpadu

Permasalahan yang terjadi adalah pengelolaan sampah yang belum terpadu. Sampai saat ini sampah masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan khususnya di kota-kota besar, permasalahan yang timbul terutama karena

- a. Besarnya volume sampah yang berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi
- b. Keterbatasan untuk pembuangan akhir sampah, sampai saat ini Kota Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) masih terletak di Kabupaten Bogor.
- c. Teknik pengolahan sampah yang masih konvensional.

Dari segi estetika sampah menjadi hal buruk yang merusak pemandangan serta bau yang tidak sedap , Sampah yang dihasilkan di Kota Bogor berasal dari aktivitas rumah tangga, sampah pasar, sampah pertokoan, sampah fasilitas umum dan sampah industry. Secara umum, peningkatan pelayanan sampah di Kota Bogor didukung oleh peningkatan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola sampah dan disertai peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah secara 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) .

2. Masalah Pencemaran Air

a. Pencemaran Air Tanah

Air tanah atau air bawah permukaan, berdasarkan letak, sifat dan kondisinya fisiknya dapat dikelompokkan ke dalam air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal terdapat pada akuifer dan pada bagian atasnya tidak tertutup oleh lapisan kedap air. Air tanah dalam dijumpai pada sumur-sumur bor. Kedalaman permukaan air tanah sangat

ditentukan oleh topografi setempat, yaitu pada tempat bertopografi rendah, dan pada tempat dengan topografi tinggi.

b. Pencemaran Air Permukaan

Air permukaan adalah badan air yang terbuka yang dapat berupa sungai atau situ. Sumber pencemaran terhadap air permukaan di Kota Bogor terutama adalah pabrik, rumah sakit, pusat perbelanjaan, restoran, dan rumah tangga yang membuang limbahnya langsung ke badan air. Limbah tersebut dapat menurunkan kualitas fisik, kimia dan biologis air sungai atau situ.

Hasil pemantauan parameter pencemaran di bagian hilir, tengah dan hulu sungai Cisadane, Cipakancilan, Ciparigi, Ciluar, Cibalok, Cidepit, dan Cibanten menunjukkan bahwa kandungan BOD, COD, kekeruhan dan coli tinja pada seluruh titik pemantauan relative tinggi. Demikian hasil pengukuran pada inlet dan outlet Situ Gede dan Situ Panjang. Kandungan coli tinja yang tinggi menyebabkan badan air tersebut tidak layak untuk keperluan rumah tangga, terutama mandi dan mencuci bahan makanan.

3. Masalah Pencemaran Udara dan Kebisingan

Pencemaran udara dapat berupa meningkatnya kandungan debu, polutan atau timbulnya bau yang tidak sedap di udara. Debu timbul dari aktivitas transportasi dan kegiatan pembangunan fisik yang menimbulkan penimbunan, pembongkaran bangunan. Pencemaran udara akibat debu sifatnya fluktuatif, dan intensitasnya tinggi terutama pada musim kemarau. Sedangkan pada musim penghujan relative rendah karena partikel debu akan larut oleh air hujan.

Polutan udara umumnya bersumber dari sisa pembakaran sumber energi dalam aktifitas permukiman, transportasi dan industri. Polutan yang banyak menjadi masalah dari aktivitas terutama adalah CO, Timbal (Pb), Hidrokarbon, SO₂, H₂S dan NH₃.

Sumber utama pencemaran udara dan kebisingan di Kota Bogor adalah aktivitas transportasi. Tingginya arus transportasi terutama angkutan umum telah menimbulkan pencemaran udara akibat emisi gas buang yang dihasilkan. Berdasarkan uji pemantauan di beberapa lokasi sample menunjukkan bahwa peningkatan kandungan NO₂ pada beberapa lokasi

telah melampaui baku mutu lingkungan. Demikian juga untuk senyawa lain seperti CO dan Hidrocarbon.

Berdasarkan hasil pemantauan selama tiga tahun terakhir tingkat kebisingan yang terjadi di Kota Bogor disebabkan oleh aktivitas transportasi dan industri.

4. Pencegahan Dampak Lingkungan

Upaya untuk meminimalkan dampak yang terjadi serta menghindari penurunan kualitas lingkungan maka upaya preventif harus dilakukan mengingat perbaikan lingkungan memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar. Upaya pencegahan dimulai dari awal aktivitas antara lain: Rencana Pembangunan di Kota Bogor diharuskan dilengkapi dengan dokumen lingkungan berupa: AMDAL, UPL-UKL, SPPL yang dapat membantu Pemda dalam proses pengambilan keputusan serta menjadi bahan acuan pengawasan. Pemantauan dan pengawasan dari pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, dilakukan setiap tahun untuk kegiatan atau usaha dan dituangkan dalam monitoring dan evaluasi.

Mengacu Pasal 22 angka (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 22 angka (1) tersebut menentukan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal/UKL/UPL. Amdal merupakan bagian dari sistem perencanaan, Amdal/UKL/UPL seharusnya dapat memberikan landasan bagi pengelolaan lingkungan dan gambaran yang jelas secara ilmiah tentang analisis kegiatan dan dampak yang mungkin akan timbul oleh sebuah kegiatan.

5. Pengendalian Perubahan Iklim

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia menandatangani Perjanjian Paris pada kesempatan pertama tanggal 22 April 2016 di New York. Penandatanganan dilanjutkan dengan proses ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Paris Agreement. Berdasarkan Paris Agreement, Indonesia menargetkan penurunan emisi (Nationally Determined Contribution) pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan

internasional. Komitmen Indonesia di tingkat internasional tersebut ditindaklanjuti dengan kebijakan nasional maupun daerah.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan misi jangka menengah, yang mana Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024. Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019-2024 yaitu :

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat

Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas

Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota.

Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (under-standing), dan mengatur/mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera.

Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah.

Berdasarkan permasalahan hal tersebut faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misikepala daerah wakil kepala daerah, seperti dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

| Visi :. Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Lingkungan | | | | |
|---|--|--|---|--|
| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih. | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Mewujudkan Kota bogor yang Sehat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin tingginya tingkat pembangunan akan berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, pencemaran lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. 2. Pemberdayaan masyarakat yang masih belum optimal. 3. Belum sinerginya aprogram pengelolaan lingkungan hidup antar sector terkait. 4. Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsinya. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terbarukannya regulasi ditingkat daerah mengenai perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. 2. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. Masih kurang memadainya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 5. Masih kurangnya sarana dan prasarana lingkungan hidup. 6. Belum adanya masterplan pengelolaan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang RTRW. 3. Tersedianya APBD. 4. Telah dibentuknya Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola lingkungan hidup dan pengelolaan sampah. 5. Adanya kemitraan dengan pihak swasta dalam mengelola lingkungan hidup. |

Sumber : Dinas LH

a. **Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

1. Rancangan Awal RKPD tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup telah sesuai dengan Program/Kegiatan yang ada di RPJMD Kota Bogor tahun 2019-2024 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021.
2. Hasil analisa kebutuhan untuk tahun 2021 telah menggunakan Permendagri nomer 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
3. Setelah dilakukan pemetaan terhadap Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 semua kegiatantelah terdefinisikan kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur nya

Tabel 2.5. (T-C. 31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020
Kota Bogor Provinsi Jawa Barat

Dinas Lingkungan Hidup

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|-----|--|------------|---|----------------|-------------------------|--|-------------------|---|----------------|------------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan (Rp.) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | 37.556.750.736 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 147.546.7 |
| | | | | | | Administrasi Keuangan | | | | 37.556.75 |
| | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Bogor | Jumlah ASN Penerima Gaji | 12 bulan | 18.247.12 |
| 2 | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | Tunjangan ASN | 12 bulan | 19.309.63 |
| | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | |
| | Pengelolaan Rumah Tangga PD | Kota Bogor | Terpenuhinya sarana dan prasarana yang optimal sebagai pendukung Kegiatan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup | 12 Bulan | 8.433.823.000 | Administrasi Umum | Kota Bogor | Terpenuhinya sarana dan prasarana yang optimal sebagai pendukung Kegiatan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 12 Bulan | 653.100.0 |
| | Pengadaan Inventaris Kantor | | Terpenuhinya sarana dan prasarana yang optimal sebagai pendukung Kegiatan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup | 12 Bulan | 219.060.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 203.500.0 |
| | | | BM Pengadaan Alat rumah Tangga | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) | 1 Paket | 322.270.0 |
| | | | BM Pengadaan Laptop/Notebook | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | Honorarium Non PNS dan Iuran Premi Asuransi | | 3.750.599 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|-------------|----------------------|--|------------|---|-----------|------------------|
| | | | | | | | | Kesehatan (untuk TKK) | | |
| | | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | | 217.123.0 |
| | | | BM Ruang Resepsionist | | | Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan | | | | 229.785.0 |
| | Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor | Kota Bogor | Terpeliharamya sarana dan prasarana inventaris kantor | 12 Bulan | 7.500.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 148.470.0 |
| | | | Belanja Service | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 116.912.8 |
| | | | Belanja Penggantian Suku Cadang | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 34.435.00 |
| | | | Belanja Bahan Bakar Minyak, gas/Pelumas | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | | | | 596.590.0 |
| | | | Belanja Surat Kendaraan Bermotor (STNK) | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | | 796.897.4 |
| | | | Belanja Bahan Bakar Minyak, gas/Pelumas | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | BM Pengadaan ruang Resepsionist | 1 Paket | 44.890.00 |
| | | | Terpeliharanya Gedung dan Perlengkapan kantor | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | 1 Paket | 896.400.0 |
| | | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | 1 Paket | 6.059.030 |
| | | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | | | 1 Paket | 221.600.0 |
| | | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | | | 1272 stel | 1.632.780 |
| | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | |
| | | | | | | Pengelolaan Sampah | | | | |
| | Pembayaran Penunjang Jasa Retribusi Sampah | Kota Bogor | Meningkatnya PAD dari Retribusi Persampahan | 300.000.000 | 300.000.000 | Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Kota Bogor | Pengelolaan Sampah dengan 3R | 1 Paket | 1.575.000 |
| | Peningkatan PAD Retribusi Persampahan | Kota Bogor | Terpenuhinya Pembayaran Penunjang Retribusi Pelayanan Sampah 100% | 175.000.000 | 175.000.000 | | | Meningkatnya PAD dari Retribusi Persampahan | | |
| | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah | Kota Bogor | Meningkatnya pemahaman dalam pengelolaan sampah 3R | | 250.000.000 | | | Terpenuhinya Pembayaran Penunjang Retribusi Pelayanan Sampah 100% | | |
| | Pengelolaan Sampah dengan 3R | Kota Bogor | Tereduksi dan terolahnya sampah di sumber | | 800.000.000 | | | Belanja Konsultasi Pemutakhiran data | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|----------|----------------|---|------------|---|---------|----------------|
| | | | | | | | | WR PDAM dan WR Non PDAM | | |
| | | | | | | | | Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | | |
| | | | | | | | | Jasa IT (Pemutaharan data WR PDAM dan Non PDAM) | | |
| | | | | | | | | Jasa tenaga administrasi Perkantoran (verifikator lapangan) | | |
| | | | | | | | | Sevice mesin Pengolah sampah | | |
| | | | | | | | | Pemeliharaan Bangunan Pengolah sampah 3R | | |
| | | | | | | | | Jasa Konsultansi Uji kualitas kompos 3R | | |
| | | | | | | | | Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | | |
| | Pelayanan Persampahan | Kota Bogor | Terangkutnya Sampah di Wilayah Kota Bogor | | 13.800.000.000 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Kota Bogor | Pelayanan Persampahan | 1 Paket | 13.800.000.000 |
| | | | Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih dan Belanja BBM | 1 Paket | | | | Terpenuhinya BBM untuk operasional persampahan | | |
| | Pengelolaan Kebersihan Berbasis Masyarakat | Kota Bogor | Terlaksananya Kebutuhan Pendukung SDM non PNS Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor | 12 Bulan | 39.371.200.000 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | Terlaksananya Kebutuhan Pendukung SDM non PNS Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor (Honorarium Padat Karya) | 1 Paket | 39.371.200.000 |
| | Pembayaran Retribusi dan Tipping Fee TPS Nambo | | Terbayarnya Retribusi dan Tipping Fee TPS Nambo | | 2.053.423.000 | Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan | | Pembayaran Retribusi dan | 1 Paket | 2.053.423.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---|---------|---------------|---|------------|---|---------|-----------|
| | | | | | | | | Tipping Fee TPS Nambo | | |
| | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | | | | |
| | | | | | | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | Pembangunan revitalisasi dan Pemeliharaan Landasan Container dan TPS | Kota Bogor | Terlaksananya Revitalisasi dan Pemeliharaan Landasan Container TPS | 1 Paket | 850.000.000 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Kota Bogor | Pembangunan revitalisasi dan Pemeliharaan Landasan Container dan TPS | 1 Paket | 850.000.0 |
| | | | Pemeliharaan Landasan Container dan TPS (30 titik) | | | | | BM Revitalisasi dan Pembangunan TPS | | |
| | | | | | | Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Kota Bogor | Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat | 1 Paket | 350.000.0 |
| | | | | | | | | BM Pengadaan Mosam | | |
| | | | | | | | | BM Peningkatan Sarana Penunjang TPS 3R | | |
| | Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan | | Terpenuhinya BBM untuk 6 unit alat berat 1 unit tangki air 2 unit kendaraan operasional dan 2 unit motor sampah | | 8.702.000.000 | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | Terpenuhinya BBM untuk 6 unit alat berat 1 unit tangki air 2 unit kendaraan operasional dan 2 unit motor sampah | 1 Paket | 18.872.49 |
| | Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga | | Tercapainya perbaikan sarana dan prasarana TPA yang tertuang dalam perjanjian kerjasama MOU tentang perpanjangan TPA Galuga | | 4.500.000.000 | | | Tercapainya perbaikan sarana dan prasarana TPA yang tertuang dalam perjanjian kerjasama MOU tentang perpanjangan TPA Galuga | | |
| | | | BM Pengadaan pengembangan bangunan Sumber air dan air tanah | | | | | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Gedung | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|---------|---------------|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | | Kantor, Jembatan Timbang, Gedung Komposting, Hanggar, Emplasement dan Tempat parkir alat berat) | | |
| | | | BM Pengadaan Jaringan Distribusi | | | | | Penutupan Lahan (Controll Land fill) | | |
| | | | | | | | | Bibit Tanaman (penanaman pohon pelindung/Buffer Zone) | | |
| | Pengadaan Alat Berat | | Kebutuhan operasi di TPA Galuga dalam meningkatkan persampahan di TPA Galuga | | 2.000.000.000 | | | Belanja Pemeliharaan jalan, drainase, listrik, IPAL TPA) | | |
| | | | Pengadaan Alat Berat Buldozer | 1 Unit | | | | BM Pengadaan pengembangan bangunan Sumber air dan air tanah (Sarana Air Bersih) | | |
| | Pengelolaan Sampah di TPA | | Terkelolanya sampah di TPA Galuga | | 3.470.492.000 | | | BM Pengadaan Jaringan Pemasangan PJU TPA | | |
| | | | Belanja Penyebar luasan informasi | 10 buah | | | | Pengadaan Alat Berat Buldozer | | |
| | | | Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan | 1 Paket | | | | Belanja Penyebar luasan informasi | | |
| | | | Jasa Tenaga Kesehatan/Kedokteran | 1 tahun | | | | Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan | | |
| | | | Jasa tenaga pendukung keamanan dan ketertiban | 1 tahun | | | | Jasa Tenaga Kesehatan/Kedokteran | | |
| | | | Jasa Kebersihan dan tenaga kebersihan | 715 OB | | | | Jasa tenaga pendukung keamanan dan ketertiban | | |
| | | | Bahan bakar minyak, gas dan Pelumas | 1 Paket | | | | Jasa Kebersihan dan tenaga kebersihan | | |
| | | | Belanja Pakaian kerja lapangan | 1 Paket | | | | Bahan bakar minyak, gas dan Pelumas | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------|---------------|--|------------|---|-----------|-----------|
| | | | Pakaian Dinas lapangan | 1 Paket | | | | Belanja Pakaian kerja lapangan | | |
| | | | Pemeliharaan | 1 Paket | | | | Pakaian Dinas lapangan | | |
| | Penyusunan laporan Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga | | Tersusunnya laporan pemantauan lingkungan Hidup TPA Galuga | | 200.000.000 | | | Tersusunnya laporan pemantauan lingkungan Hidup TPA Galuga (Monitoring UKL UPL) | | |
| | Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana | | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur | | 9.585.052.000 | Penyediaan Sarana Persampahan | | Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana | 1 Paket | 9.565.252 |
| | | | | | | | | Pengadaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Gerobak sampah dan tong sampah terpilah | | |
| | | | | | | | | BM Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Mosam 75 unit, Dumptruck 1 unit, Truck compactor 1 unit) | | |
| | | | | | | | | BM Pengadaan Tong Sampah Beroda 72 buah, bak container 50 buah, vacum sweeper 4 buah, mesin potong rumput | | |
| | PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (M1S4) | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | |
| | Identifikasi Timbulan Sampah Limbah B3 | | Tersedianya Dokumen Identifikasi Timbulan Sampah B3 | | 100.000.000 | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | | | | |
| | | | Kajian Identifikasi dan Penanganan Timbulan Sampah Limbah B3 yang Ber SPPL dari tahun 2019-2020 | 1 Dokumen | | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Kota Bogor | Kajian Identifikasi dan Penanganan Timbulan Sampah Limbah B3 yang Ber SPPL dari tahun 2019-2020 | 1 Dokumen | 225.000.0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|--|---------|-------------|---|------------|---|---------|-----------|
| | Pembinaan Kegiatan Usaha Limbah B3 | | Terbinanya Kegiatan/Usaha Penghasil Limbah B3 | | 125.000.000 | | | Terlaksananya Sosialisasi Perizinan TPS limbah B3 bagi Kegiatan/Usaha penghasil Limbah B3 yang belum memiliki izin TPS B3 | 1 Paket | |
| | | | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | |
| | Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan yang Wajib AMDAL, UKL_UPL dan SPPL | Kota Bogor | Terbinanya Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan/atau Usaha di Kota Bogor | 1 Paket | 500.000.000 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Kota Bogor | Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan yang Wajib AMDAL, UKL UPL dan SPPL | 1 Paket | 500.000.0 |
| | Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah I, II dan III | Kota Bogor | Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan terhadap Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan | | 150.000.000 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah I | 1 Paket | 150.000.0 |
| | | | Sertifikasi pengujian Kualitas air limbah hasil pengaduan | 1 Paket | | | | Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah II | 1 Paket | |
| | | | Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Cara Pengaduan Wilayah I | 1 Paket | | | | Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah III | 1 Paket | |
| | | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | |
| | | | | | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|---|------------|-------------|--|------------|---|------------|-----------|
| | Pengendalian Pencemaran Air | | Tersedianya Data kualitas air sungai dan situ pada musim penghujan, musim peralihan dan kemarau | 108 sampel | 836.400.000 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Kota Bogor | Tersedianya Data kualitas air sungai dan situ pada musim penghujan, musim peralihan dan kemarau | 108 sampel | 1.567.750 |
| | | | Data kualitas air limbah usaha/kegiatan | 1 Paket | | | | Data kualitas air limbah usaha/kegiatan | 1 Paket | , |
| | | | Data kualitas air sumur di dekat sumber pencemar | 50 sampel | | | | Data kualitas air sumur di dekat sumber pencemar | 50 sampel | |
| | | | Data kualitas air limbah sanimas komunal | 1 Paket | | | | Data kualitas air limbah sanimas komunal | 1 Paket | |
| | | | Terlaksananya Bintek Pengendalian pencemaran air | 1 kali | | | | Terlaksananya Bintek Pengendalian pencemaran air | 1 kali | |
| | | | Terlaksananya pelatihan penginputan data pada Web Nawasis Info | 1 kali | | | | Terlaksananya pelatihan penginputan data pada Web Nawasis Info | 1 kali | |
| | Pengendalian Pencemaran Udara | | Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar udara yang telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya | 32 sampel | 691.550.000 | | | Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar udara yang telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya | 32 sampel | |
| | | | Data pengujian dan analisa kualitas udara ambien secara passive | 32 sampel | | | | Data pengujian dan analisa kualitas udara ambien secara passive | 32 sampel | |
| | | | Data emisi sumber tidak bergerak | 7 sampe | | | | Data emisi sumber tidak bergerak | 7 sampe | |
| | | | Tersedianya laporan pengujian emisi gas buang kendaraan | 2 laporan | | | | Tersedianya laporan pengujian emisi gas buang kendaraan | 2 laporan | |
| | | | Laporan Kajian Pemantauan kinerja Lalu Lintas dalam rangka Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan | 2 laporan | | | | Laporan Kajian Pemantauan kinerja Lalu Lintas dalam rangka Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan | 2 laporan | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|--|--------------------------|---------------|--|------------|--|--------------------------|-----------|
| | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | | | | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | |
| | Pengelolaan Sumber Daya Air | | | | 1.000.000.000 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Kota Bogor | Pengelolaan Sumber Daya Air | | 1.000.000 |
| | | | Terlaksananya pembuatan sarana konservasi air, yaitu sumur resapan | sumur resapan : 100 unit | | | | Terlaksananya pembuatan sarana konservasi air, yaitu sumur resapan | sumur resapan : 100 unit | |
| | | | Terpeliharanya Peralatan Sumur Pantau | 5 Lokasi | | | | Terpeliharanya Peralatan Sumur Pantau | 5 Lokasi | |
| | | | Terpeliharanya sumur resapan yang terbangun | 50 Titik | | | | Terpeliharanya sumur resapan yang terbangun | 50 Titik | |
| | | | Tersusunnya perencanaan pembangunan Sumur Resapan | 1 Dokumen | | | | Tersusunnya perencanaan pembangunan Sumur Resapan | 1 Dokumen | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Sumur Resapan | 1 Dokumen | | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Sumur Resapan | 1 Dokumen | |
| | | | Terlaksananya pengawasan pembangunan Sumur Resapan | 1 paket | | | | Terlaksananya pengawasan pembangunan Sumur Resapan | 1 paket | |
| | | | Terlaksananya pengawasan pemeliharaan Sumur Resapan | 1 paket | | | | Terlaksananya pengawasan pemeliharaan Sumur Resapan | 1 paket | |
| | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | |
| | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Kota Bogor | Terpeliharanya penanaman pohon tahun sebelumnya | 1000 Pohon | 250.000.000 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | Dokumen Kehati | 1 Dokumen | | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Kota Bogor | Tersusunnya Dokumen Keanekaragaman Hayati | 1 Dokumen | 250.000.0 |
| | | | | | | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati | | Tersedianya Bibit Tanaman, pupuk, terpeliharanya | 1000 Pohon, 4800Kg, | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---|-----------|-------------|---|------------|--|-----------|-----------|
| | | | | | | | | penanaman pohon tahun sebelumnya | 500 pohon | |
| | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | |
| | Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Kota Bogor | Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas | 1 dokumen | 250.000.000 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | | | | |
| | Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah | Kota Bogor | Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas | 1 dokumen | 450.000.000 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Kota Bogor | Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 1 Dokumen | 700.000.0 |
| | | | | | | | | Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah | 1 Dokumen | |
| | MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM | | | | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | |
| | Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim | Kota Bogor | Terbinanya wilayah yang menjadi kampung iklim dan ecovillage dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim | 5 Lokasi | 250.000.000 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Kota Bogor | Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim | 5 Lokasi | 400.000.0 |
| | Inventarisasi Gas Rumah Kaca | Kota Bogor | Tersusunnya Dokumen Inventarisasi GRK | 1 dokumen | 152.000.000 | | | Tersusunnya Dokumen Inventarisasi GRK | 1 dokumen | |
| | | | | | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | |
| | | | | | | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata | | Presentase Sekolah Adiwiyata | 33% | 375.000.000 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan | Kota Bogor | Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata | | 1.575.000 |

b. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kegiatan yang merupakan usulan masyarakat dan pemangku kepentingan yang masuk forum Musrembang baik tingkat kelurahan maupun kecamatan yang ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun 2021 terdapat dalam tabel T-C.32

Usulan-usulan tersebut telah sesuai dengan isu strategis di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup yaitu adanya ancaman terhadap krisis lingkungan pada masa depan yang diakibatkan oleh tingginya tingkat pencemaran dalam hal ini terkait dengan pengelolaan persampahan.

Tabel 2.6. (T-C.32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kota Bogor Jawa Barat

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran /Volume | Catatan |
|-----|---|--|--|-----------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | | | | |
| | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal | Pembangunan TPS | 1 Unit | |
| | | Rt. 2 Rw.6 Kelurahan Pakuan Bogor Selatan | Pengadaan tempat penampungan sampah terpadu ukuran 4x6 meter | 10 Unit | |
| | | Rt. 7 Rw. 17 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara | Pengadaan tempat penampungan | 1 Unit | |
| | Penyediaan Sarana Persampahan | Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Lawang Gintung Kecamatan Bogor Selatan | Pengadaan Tong Sampah | 10 Unit | |
| | | Kelurahan Pakuan Kecamatan Bogor Selatan | Pengadaan Gerobak Sampah | 10 Unit | |
| | | Kelurahan Situgede Kecamatan Bogor Barat | Pengadaan Motor sampah 1 unit | 1 Unit | |
| | | Rt. 1 RW. 6 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Bogor Timur | Pengadaan Motor Sampah | 1 Unit | |
| | | RW. 9 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Bogor Timur | Pengadaan Bak sampah | 1 Unit | |
| | | Rt. 2 Rw. 1 Kelurahan Rancamaya Kecamatan Bogor Selatan | Pengadaan Tong sampah | 5 Unit | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|----------|--|
| | | RW. 4 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan | Pengadaan Tong sampah beroda | 10 Unit | |
| | | Rt. 3, 4 Rw. 6 Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor Barat | Pengadaan Gerobak pengangkut sampah | 2 Unit | |
| | | Rt. 4 Rw. 14 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan | Pengadaan Gerobak sampah | 5 Unit | |
| | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan | Pelatihan dan Pengelolaan sampah dan kerajinan limbah kain | 75 orang | |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

6.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang mempunyai fungsi menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup mempunyai kewenangan pada 11 sub bidang yaitu :

Tabel 3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

- 44 -

K. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

| NO | SUB BIDANG | PEMERINTAH PUSAT | DAERAH PROVINSI | DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|----|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Perencanaan Lingkungan Hidup | Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) nasional. | RPPLH provinsi. | RPPLH kabupaten/kota. |
| 2. | Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Nasional. | KLHS untuk KRP provinsi. | KLHS untuk KRP kabupaten/kota. |
| 3. | Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah provinsi dan/atau lintas batas negara. | Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. | Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota. |

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

| NO | SUB BIDANG | PEMERINTAH PUSAT | DAERAH PROVINSI | DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|----|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Pengelolaan Kehati nasional. | Pengelolaan Kehati provinsi. | Pengelolaan Kehati kabupaten/kota. |
| 5. | Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | a. Pengelolaan B3. b. Pengelolaan limbah B3. | Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. | a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. |
| 6. | Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) | Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. | Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. | Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. |

- 46 -

| NO | SUB BIDANG | PEMERINTAH PUSAT | DAERAH PROVINSI | DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|----|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH | a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi. | a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih | a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. |

- 47 -

| NO | SUB BIDANG | PEMERINTAH PUSAT | DAERAH PROVINSI | DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|-----|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. | |
| 8. | Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat nasional. | Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi. | Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota. |
| 9. | Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional. | Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi. | Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota. |
| 10. | Pengaduan Lingkungan Hidup | Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan | Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan | Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan |

- 48 -

| NO | SUB BIDANG | PEMERINTAH PUSAT | DAERAH PROVINSI | DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|-----|-------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. | dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. | dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. |
| | | b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah provinsi. | b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota. | b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota. |
| 11. | Persampahan | a. Penerbitan izin insenerator pengolahan sampah menjadi energi listrik. b. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (<i>landfill gas</i>) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak | Penanganan sampah di TPA/TPST regional. | a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan |

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

| NO | SUB BIDANG | PEMERINTAH PUSAT | DAERAH PROVINSI | DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|----|------------|---|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | swasta. c. Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh pihak swasta. d. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. e. Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. | | pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta. |

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Strategi merupakan aturan atau arahan untuk mencapai misi dan tujuan yang dapat meliputi kegiatan atau program secara keseluruhan. Strategi dibangun melalui pemanfaatan semua kekuatan (sumberdaya) dan peluang secara optimal serta memperhatikan semua kelemahan dan ancaman sebagai

bahan koreksi. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dengan memanfaatkan semua kelebihan dan meminimumkan kelemahan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Tabel berikut menyajikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Berikut indikator sasaran, dan target kinerja sasaran untuk 5 tahun ke depan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, sehingga bisa dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan papara misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut misi yang terkait dengan urusan pemerintah urusan lingkungan hidup adalah misi ke 1 Mewujudkan Kota Bogor yang sehat dan Misi 2 Mewujudkan Kota Bogor yang cerdas.

Adapun Tujuan dari misi 1 adalah terwujudnya masyarakat yang sehat dan lingkungan yang berkualitas

Mengacu kepada kerangka di atas, dalam upaya mewujudkan visi dan misi terkait khusus urusan Lingkungan Hidup, serta, berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Dinas LH Kota Bogor, memfokuskan kepada pencapaian dua tujuan sasaran Rencana Pembangunan Jangka

Menengah di atas, yaitu: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dimana diterjemahkan dalam bidang lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas air dan udara, melalui Indikator Kinerja Organisasi: Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan diatas yang menjadi tupoksi Dinas LH ditetapkan ada 5 sasaran yaitu:

1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS.

2. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas lingkungan sehat di Kawasan perumahan dan permukiman adalah : persentase reduksi sampah.

3. Terkendalinya sumber-sumber pencemar air

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar air adalah Indeks Kualitas Air.

4. Terkendalinya sumber sumber pencemar udara

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar udara adalah Indeks Kualitas udara.

5. Meningkatkan Kualitas ruang terbuka hijau public perkotaan

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau public perkotaan adalah persentase RTH Publik.

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 1 (satu) melalui 7 (Tujuh) program yaitu : (1) Program kemitraan lingkungan hidup, (2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan sampah, (3) Program Peningkatan pengolahan sampah berbasis 3R, (4) Program Perbaikan Optimalisasi Operasional Pemeliharaan Fungsi TPA, (5) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, (6) Pelindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan (7) Program Mitigasi dan Perubahan Iklim.

Adapun Tujuan dari misi 2 adalah :

Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (*Smart government*), yang dapat diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan level Kematangan Smart City.

Untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 2 sasaran yaitu:

1. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

2. Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi.

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 2 (dua) melalui 4 (empat) program yaitu (1) Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber daya Alam dan lingkungan, (2) Pelayanan Administasi Perkantoran. (3) Peningkatan Sarana dan Prasarana paratur, dan (4) Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Kinerja dan Keuangan.

Setelah dilakukan pemetaan sesuai PMDN 90 Tahun 2019 maka disepakati bahwa Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2021 terdiri dari 10 program 14 kegiatan, dan 36 sub kegiatan yang telah sesuai dengan kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur dalam PMDN Nomor 90 Tahun 2019.

Total Kebutuhan dana/Pagu Indikatif Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 adalah sebesar Rp. 147.546.750.736,- (Seratus empat puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga enam rupiah)

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2021 dan Perkiraan Maju tahun 20202 dapat dilihat pada tabel T-C. 33, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2. (T-C.33)
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021
 dan Perkiraan Maju Tahun 2022
 Provinsi/Kabupaten/Kota Bogor

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Target Capaian Kinerja | |
|------|----|----|------|----|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 04 | 2.01 | | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 04 | 2.01 | 03 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Pembangunan Revitalisasi dan Pemeliharaan Landasan Container dan TPS | Kota Bogor | 5 | 850.000.000 | APBD | | 5 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|------------|-------|----------------|------|---|-------|--|
| 1 | 03 | 04 | 2.01 | 04 | Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat | Kota Bogor | 1 | 350.000.000 | APBD | | 1 | |
| 1 | 03 | 04 | 2.01 | 05 | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga Pengadaan Alat Berat Pengelolaan Sampah di TPA Penyusunan Laporan Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga Tersedianya BBM Solar HSD, BBM Bensin, dan Pelumas untuk 6 unit Alat Berat, 1 unit TruckTangki Air, 2 unit Mobil / Roda 4, dan 2 unit MotorSampah / Roda 3 Tersedianya Suku Cadang dan Pemeliharaan 9 unit Alat Berat, 1 unit Truck Tangki Air, 2 unit Mobil / Roda 4, 2 unit Motor Sampah / Roda 3, dan 6 unit Sepeda Motor / Roda 2 | Kota Bogor | | 18.872.492.000 | APBD | | 98,95 | |
| 1 | 03 | 04 | 2.01 | 06 | Penyediaan Sarana Persampahan | Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana | Kota Bogor | 100 | 9.565.252.000 | APBD | | 100 | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 02 | 2.01 | | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah layanan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang terintegrasi sistem informasi | Kota Bogor | 1 | 700.000.000 | APBD | 1 | | |
| 2 | 11 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Kota Bogor | 1 | 400.000.000 | APBD | 1 | | |
| 2 | 11 | 03 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Indeks Kualitas Air | | 51,67 | | | | 49,8 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|------------|-------|---------------|------|--|------|--|
| | | | | | | Indeks Kualitas Udara | | 81,76 | | | | 86,1 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Pengendalian pencemaran air pengendalian pencemaran udara | Kota Bogor | | 1.567.750.000 | APBD | | | |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Pembinaan dan bantuan teknis kampung iklim Tersusunnya dokumen inventarisasi GRK | Kota Bogor | 1 | 400.000.000 | APBD | | 1 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.03 | | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 03 | 2.03 | 04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Pengelolaan sumber daya air | Kota Bogor | 5 | 1.000.000.000 | APBD | | 5 | |
| 2 | 11 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | | Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati | Tersedianya bibit tanaman, pupuk, terpeliharanya penanaman pohon tahun sebelumnya serta dokumentasi kehati | Kota Bogor | 0,5 | 250.000.000 | APBD | | | |
| 2 | 11 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 05 | 2.01 | | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|------------|--------------------|-------------|------|--|--------------------|
| 2 | 11 | 05 | 2.01 | 02 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Kajian Identifikasi dan Penanganan Timbulan Sampah Limbah B3 yang ber SPPL dari tahun 2019-2020 Terlaksananya Sosialisasi Perizinan TPS limbah B3 bagi Kegiatan/Usaha Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki izin TPS B3 | Kota Bogor | 120 Kegiatan Usaha | 225.000.000 | APBD | | 120 Kegiatan Usaha |
| 2 | 11 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | | | | |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan yang Wajib AMDAL,UKL-UPL, dan SPPL | Kota Bogor | 250 | 500.000.000 | APBD | | 250,00 |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | 03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan wilayah 1 Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan wilayah 2 Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan wilayah 3 | Kota Bogor | 100 | 150.000.000 | APBD | | |
| 2 | 11 | 08 | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | | | |
| 2 | 11 | 08 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|------------|-------|----------------|------|--|--------|
| 2 | 11 | 08 | 2.01 | 01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup | Kota Bogor | 3 | 1.260.500.000 | APBD | | 3 |
| 2 | 11 | 09 | | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | | | |
| 2 | 11 | 09 | 2.01 | | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| 2 | 11 | 09 | 2.01 | 01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Pembinaan dan penilaian sekolah adiwiyata Perlombaan kebersihan | Kota Bogor | 210 | 1.575.000.000 | APBD | | 220,00 |
| 2 | 11 | 11 | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | | Pengelolaan Sampah | | | | | | | |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 02 | Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah dengan 3R Peningkatan PAD Retribusi Sampah | Kota Bogor | 6,6 | 1.575.000.000 | APBD | | 6,8 |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 03 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Pelayanan Persampahan | Kota Bogor | 76,5 | 13.800.000.000 | APBD | | 77,00 |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 04 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Honorarium PKWT 1272 orang | Kota Bogor | 1.272 | 39.371.200.000 | APBD | | 1.272 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|------------|----------|----------------|------|--|----------|--|
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 06 | Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan | Pembayaran Retribusi dan Teeping Fee TPS Nambo | Kota Bogor | 12 bulan | 2.053.423.000 | APBD | | 12 bulan | |
| 2 | 11 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.01 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Bogor | 100 | 37.556.750.736 | APBD | | 100,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.03 | | Administrasi Umum | | | | | APBD | | 100,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.03 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Belanja Jasa Kantor | Kota Bogor | 100 | 653.100.000 | APBD | | 100,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.03 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya Perlengkapan dan Peralatan Kantor | Kota Bogor | 100 | 203.500.000 | APBD | | 100,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.03 | 06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) | Kota Bogor | 100 | 322.270.000 | APBD | | 100,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.03 | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Honorarium TTK Iuran Premi Asuransi Kesehatan TTK | Kota Bogor | 100 | 3.750.599.712 | APBD | | 100,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.03 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terpenuhinya Alat Tulis Kantor | Kota Bogor | 100 | 217.123.000 | APBD | | 100,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.03 | 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terpenuhinya Alat Percetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Barang cetakan tersedianya alat cetakan | Kota Bogor | 100 | 229.785.000 | APBD | | 100,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.03 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bm Pengadaan Dispenser dan TV BM Pengadaan Laptop/ Notebook | Kota Bogor | 100 | 148.470.000 | APBD | | 100,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.03 | 14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Kota Bogor | 100 | 116.912.800 | APBD | | 100,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.03 | 16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Bahan Logistik | Kota Bogor | 100 | 34.435.000 | APBD | | 100,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.03 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Terpenuhinya Sarana Makan dan Minum | Kota Bogor | 100 | 596.590.000 | APBD | | 100,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|------------|-----|---------------|------|--|--------|
| 2 | 11 | 01 | 2.03 | 18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota Bogor | 100 | 796.897.488 | APBD | | 100,00 |
| 2 | 11 | 01 | 2.03 | 22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | BM Pengadaan Ruang Receptionis | Kota Bogor | 100 | 44.890.000 | APBD | | 100,00 |
| 2 | 11 | 01 | 2.03 | 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Pemeliharaan Gedung Kantor | Kota Bogor | 100 | 896.400.000 | APBD | | 100,00 |
| 2 | 11 | 01 | 2.03 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya pemeliharaan kendaraan Dinas | Kota Bogor | 100 | 6.059.030.000 | APBD | | 100,00 |
| 2 | 11 | 01 | 2.03 | 32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya pemeliharaan perlengkapan kantor | Kota Bogor | 100 | 221.600.000 | APBD | | 100,00 |
| 2 | 11 | 01 | 2.04 | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.04 | 03 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Tersedianya Sarana Pakaian Lapangan | Kota Bogor | 100 | 1.632.780.000 | APBD | | 100,00 |

BAB V
P E N U T U P

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2021 yang merupakan arahan bagi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Satuan kerja Pemerintahan Kota Bogor sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Diharapkan Renja ini dapat bermanfaat sebagai pedoman operasional bagi aparat Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dan diperlukan konsistensi dan disiplin yang kuat dari setiap pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor untuk merealisasikan Rencana Kerja ini agar terciptanya Kota Bogor yang bersih, nyaman dan berwawasan lingkungan. .

WALIKOTA BOGOR,

BIMA ARYA
